

PEMULIHAN (*REPARATIONS*) KORBAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI ARGENTINA DAN CILE

Andrey Sujatmoko

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti
E-mail : sujatmoko_a@yahoo.com

Abstract

Reparation is an integral part of state responsibility for the past of gross human rights violations committed in any country and it is also legal obligation under international law. Those violations have ever committed in Argentina (1976-1983) and Chile (1973-1990) during the military dictatorship regime. The applied method in this study is descriptive-analytic with historical approach to the reparation efforts for the victims of the past gross human rights violations in those countries. The author concludes that the characteristic of the gross human rights violations committed in Argentina and Chile can be categorized as crime against humanity based on the Rome Statute 1998. Reparations programs by fullfiling economic and social rights of the victims of gross human rights violations have been done by both countries as well.

Keywords:

Reparation, Victim, Violation

Abstrak

Pemulihan adalah bagian integral dari tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM masa lalu yang terjadi di dalam suatu negara dan hal itu juga merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional. Pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah terjadi di Argentina (1976-1983) dan Chile (1973-1990) selama rezim diktator militer berkuasa. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan historis terhadap upaya upaya-upaya pemulihan terhadap para korban pelanggaran berat HAM masa lalu di kedua negara tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa karakteristik pelanggaran berat HAM yang terjadi di Argentina dan Chile dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998. Program-program pemulihan dengan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial dari para korban pelanggaran juga telah dilakukan oleh kedua negara itu.

Kata Kunci:

Pemulihan, Korban, Pelanggaran

Pendahuluan

Argentina (1976-1983) dan Cile (1973-1990) pernah mengalami peristiwa pelanggaran berat HAM yang ditunjukkan dengan keterlibatan pihak militer dalam pelanggaran berat HAM yang terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa negara melalui organnya, terutama aparat militernya, telah melakukan tindakan (*commission*) berupa pelanggaran berat HAM yang menurut hukum internasional termasuk dalam kategori tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful act*). Oleh karena itu, kedua negara itu harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, serta berkewajiban pula untuk melakukan pemulihan (*reparations*) terhadap para korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran berat HAM yang terjadi.

Terkait hal di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini yaitu: apa yang menjadi karakteristik pelanggaran berat HAM dan korban di negara Argentina dan Cile dan bagaimana pemulihan melalui pemenuhan hak ekonomi dan sosial yang dilakukan di kedua negara itu.

Karakteristik Pelanggaran Berat HAM dan Korban di Argentina

Sejak 1976 hingga 1983, rakyat Argentina hidup di bawah salah satu diktator militer yang paling represif dan brutal di abad ke-20. Lebih dari kurun waktu tujuh tahun, sayap-kanan junta militer yang mengambil kekuasaan pada bulan Maret 1973 melaksanakan Proses Reorganisasi Sosial, dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Proses, yang berupaya untuk membunuh setiap orang yang dianggap sebagai seorang subversif, unsur dari golongan kiri di seluruh negeri. Upaya ini mendorong terjadinya penyiksaan, kematian, dan penghilangan sekitar 30.000 warga negara Argentina yang diculik oleh polisi militer dan dibawa ke pusat-pusat penahanan rahasia yang tersebar di seluruh negeri. Ketika keluarga-keluarga dari para korban maju ke negara untuk mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga-keluarga mereka, mereka akan mendapati bahwa seluruh bukti dari anggota keluarga mereka yang masih hidup seluruhnya telah dihilangkan; pemerintah bertindak seolah-olah orang-orang yang telah dihilangkan tersebut tidak pernah ada sejak awal. Seperti halnya di sebagian besar rezim diktator, selama berlangsungnya diktator militer Argentina, dikenal oleh banyak pihak di luar negeri sebagai "perang kotor", rakyat hidup di dalam lingkungan yang dikontrol secara ketat yang sebagian besar diatur dengan menimbulkan rasa takut.¹

Pelanggaran HAM yang terjadi di Argentina di bawah diktator militer yang terakhir (1976-1983) merupakan suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam negara Argentina.² Salah satu praktik yang terkenal paling buruk adalah mengambil

¹ Kerry Whigham, "Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies", Disertasi, New York University, 2016, hlm. 203.

² Michelle D. Bonner, "Defining Rights in Democratization: The Argentine Government and Human Rights Organizations, 1983-2003", *Latin American Politics and Society*, Winter 2005; 47, 4, hlm. 55.

anak-anak dari ibu mereka dan menyerahkannya kepada keluarga-keluarga kalangan militer untuk dibesarkan.³

Dinamakan *guerra sucia* (perang kotor). Berlangsung di Argentina di bawah berbagai macam pemerintahan militer yang berkuasa dari tahun 1976 hingga 1983, menimbulkan penghilangan orang antara 9.000 dan 30.000 orang, dan banyak lagi korban-korban penyiksaan dan penahanan berkepanjangan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh terburuk terorisme negara di abad ke-12 Amerika Latin. Tuntutan atas keadilan dianggap penting dalam kampanye pemilihan dari kandidat pemenang, Raúl Alfonsín, selama pemilihan presiden tahun 1983 yang memperbaiki aturan menyangkut warga sipil. Selama kepresidenan Alfonsín (1983-1989) isu HAM berlanjut mengambil tempat yang penting dalam diskursus publik. Perjuangan untuk membawa ke pengadilan para pelaku kejahatan juga menimbulkan kontroversi dan menuai kerusuhan di dalam jenjang kepangkatan militer. Di tempat yang dianggap sebagai kantornya, Alfonsín membentuk suatu komisi kebenaran, Komisi Nasional tentang Penghilangan Orang Secara Paksa (*Commission Nacional sobre la Desparicion de Personas*, CONADEP), untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM oleh kalangan militer. Laporan final komisi mengarahkan tuduhan atas kejahatan-kejahatan oleh militer dan menyusun tahapan, maupun menyediakan seperangkat bukti untuk proses pengadilan anggota-anggota junta militer yang memimpin negara antara tahun 1976-1983.⁴

Beberapa kasus Argentina muncul dari upaya-upaya terkoordinasi dari negara-negara "Southern Cone" berlanjut mendapat perhatian dari pengadilan-pengadilan internasional. Pada malam terjadinya kudeta, aparat-aparat pemerintahan militer Provinsi Tucuman menculik dan menyiksa Jose Siderman. Setelah ia melarikan diri ke Amerika, Siderman menggugat Argentina dan beberapa pejabat atas penyiksaan dan pengambilalihan harta kekayaan dalam jumlah besar. Eks perwira angkatan laut Adolfo Scilingo telah mengakui bahwa ia berpartisipasi dalam penculikan, penyiksaan, dan penghilangan orang, termasuk melemparkan para korban keluar dari pesawat terbang. Ia bepergian ke Spanyol secara sukarela untuk bersaksi, lalu ditahan atas kejahatannya, dan akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman pada tahun 2005 pidana penjara selama 640 tahun di mana ia sekarang menghadapi dakwaan penyiksaan dan pembunuhan yang muncul dari fasilitas interniran di Sekolah Mekanik Angkatan Laut di Buenos Aires.⁵

Sesaat setelah jatuhnya pemerintahan Isabel Peron melalui kudeta militer bulan Maret 1976, rezim politik militer mulai melancarkan operasi penumpasan gerakan rakyat dalam waktu 8 bulan, pembunuhan ekstrajudisial, penculikan, penyiksaan telah memakan korban sekitar 10.000 jiwa. Rezim politik itu mulai mengalami krisis setelah gagal mendapatkan kepulauan Falkland dalam perang Malvinas dengan Inggris pada

³ Robert C. Power, "Pinochet and the Uncertain Globalization of Criminal Law", *The George Washington International Law Review*; 2007; 39, 1; hlm. 100.

⁴ Dinah L. Shelton, (edit.), *Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity*, [A-H] 1, (Farmington Hills, MI: Thomson Gale, 2005) hlm. 63.

⁵ Robert C. Power, *op. cit.*, hlm. 101.

awal tahun 80-an. Sejak itu, proses reformasi mulai berlangsung dan represi pemerintah melunak. Namun mayoritas kekuasaan terpenting masih berada di kalangan jenderal. Pada akhir 1983, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan pengampunan umum (amnesti) bagi semua orang yang melakukan kekerasan selama "perang melawan subversi" antara bulan Mei 1973 hingga Juni 1982. Amnesti ini diberikan sebagai jalan untuk rekonsiliasi nasional.⁶

Penyiksaan adalah metode yang lebih disukai untuk menghancurkan seorang musuh yang didefinisikan sebagai suatu penghilangan jati diri. Penyiksaan, seperti yang diperdebatkan oleh Robben dan lainnya, "adalah untuk melengkapi kemenangan atas dasar pikiran dan jati diri dari yang dikalahkan, karena penyiksaan adalah ketika budaya diwujudkan secara penuh". Dan apa yang diikuti adalah politik penyiksaan mengejar laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, para gerilyawan dan simpatisannya. Penyiksaan bukan tentang mencari informasi, tetapi tentang menghancurkan pikiran dan membongkar kemampuan bersosialisasi yang dimiliki oleh seseorang melalui traumatisasi jiwa yang harus hilang selamanya karena penyiksaan dimaksudkan untuk membunuh ide-ide bukan ideologi. Tujuannya adalah untuk menjamin suatu dunia di mana individu akan berhubungan dengan aktivitas politik di masa depan dengan pengalaman rasa sakit yang luar biasa saat disiksa.⁷

Penghilangan juga dimaksudkan untuk melumpuhkan, menanamkan rasa takut dan ketidakpercayaan, dan memaksa pihak keluarga dari yang dihilangkan menjadi kesepian dan putus asa. Namun demikian, terdapat salah pengertian dari pihak militer adanya kebutuhan bagi orang tua, khususnya para ibu, untuk menemukan anak mereka; para ibu tersebut pada akhirnya mengembangkan satu-satunya forum di mana bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah dapat diungkapkan. Terlebih lagi, pihak penguasa tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, bayi atau orang dewasa. Penghilangan terhadap lebih dari 200 bayi masih menghantui kepemimpinan pihak penguasa sejak penculikan anak-anak dikecualikan dari amnesti umum bagi militer dalam tahun 1989 dan 1990, dan hal itu telah digunakan sebagai alasan untuk membawa Jenderal Jorge Rafael Videla dan Laksamana Eduardo Massera ke pengadilan. Karena pihak militer meremehkan ikatan keibuan, para ibu dapat bekerja melalui trauma sosial mereka dan memperluas ke dalam ruang publik, menyediakan suatu kancah politik bagi mereka sendiri.⁸

Sebagaimana data yang terus dikumpulkan, hal itu sekarang terpikirkan bahwa 500 orang anak telah dicuri. Sejak didirikannya CONADI, kira-kira 64 kasus baru telah ditemukan dari wanita yang dilaporkan sedang mengandung saat mereka dihilangkan (CONADI 2001). Sepanjang September 2001, CONADI memiliki 354 arsip mengenai

⁶ Ifdhal Kasim dan Eddie Riyadi Terre, (eds.), *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, (Jakarta: ELSAM, cetakan ke-1, 2003) hlm. 134-135.

⁷ Borzutzky, Silvia, "The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile", *Latin American Research Review*; 2007; 42, 1, hlm. 177.

⁸ *Ibid.*

remaja yang tidak jelas identitasnya atau dicurigai bahwa mereka mungkin anak dari yang dihilangkan yang telah ditemukan. Awalnya pejabat-pejabat militer, terutama Jenderal Jorge Rafael Videla dan Komandan Angkatan Laut Laksamana Emilio Eduardo Massera (presiden selama kediktatoran yang terakhir), telah didakwa secara individu atas pencurian anak-anak. Tetapi, sejak 1999 pihak pengadilan telah memeriksa suatu rencana sistematis oleh rezim militer untuk mencuri anak-anak dan telah mendakwa banyak pejabat tinggi militer atas keterlibatan mereka. Sepanjang tahun 2001, lebih dari setengah lusin pejabat tinggi militer telah dituduh, termasuk para anggota junta militer, seperti Alfredo Astiz dan Reynaldo Benito Antonio Bignone sebagai tambahan terhadap Videla dan Massera.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan yang terjadi di Argentina menurut Statuta Roma 1998 dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)¹⁰ yaitu: pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, serta penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan persekusi.

Praktik Pemulihan yang Telah Dilakukan di Argentina

Tidak seperti amnesti di Cile, undang-undang Argentina menyatakan bahwa amnesti "tidak menghalangi pengajuan suatu gugatan perdata". Namun demikian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan kompensasi kepada para korban. UU No. 23.466 memberikan dana pensiun setara dengan 75% dari gaji minimum seumur hidup bagi sanak famili selanjutnya dari orang hilang. Uang pensiun dapat diklaim oleh anak belum dewasa di bawah 21 tahun yang menunjukkan bahwa satu atau kedua orang tuanya merupakan korban dari penghilangan paksa. Pasangan yang masih hidup dan anak-anak di bawah 21 tahun, para orang tua dan atau adik atau kakak kandung yang hidup bersama korban sebelum penghilangan terjadi dapat juga memenuhi syarat untuk menerima pensiun.¹¹

⁹ Michelle D. Bonner, *op. cit.*, hlm. 65.

¹⁰ Vide Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Kejahatan Internasional. Pasal itu menyatakan bahwa: "*For the purpose of this Statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; (i) Enforced disappearance of persons; (j) The crime of apartheid; (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.*"

¹¹ Jayni Edelstein, "Rights, Reparations and Reconciliation: Some Comparative Notes", <<https://www.csvr.org.za/publications/1707-rights-reparations-and-reconciliation-some-comparative-notes>> [01/01/2017].

Kelak, Presiden Menem akan menandatangani dekrit yang menyatakan bahwa orang-orang yang telah ditahan atas alasan-alasan politis selama periode 1976-83 akan berhak atas bantuan keuangan. UU khusus diberlakukan untuk membawa prinsip kompensasi. UU No. 24.043 diberlakukan pada tanggal 23 Desember 1991, menetapkan ganti rugi dari Negara, dapat dibayarkan dalam enam kali angsuran, bagi orang-orang yang "ditempatkan di tempat pembuangan Eksekutif Nasional, atau mereka, sebagai orang-orang sipil, mengalami penahanan semata-mata dilakukan oleh pengadilan-pengadilan militer" selama negara dalam keadaan darurat, namun mereka belum menerima ganti rugi berdasarkan suatu perintah pengadilan yang sebelumnya.¹²

Secara rinci, kompensasi terdiri dari sepertiga puluh dari gaji bulanan di kategori tertinggi pada skala pegawai negeri untuk tiap hari penahanan. Bagi yang menderita luka-luka serius selama penahanan, kompensasi terdiri dari sepertiga puluh dari gaji bulanan untuk setiap hari penahanan, ditambah jumlah yang setara dengan lima tahun tambahan, dikurangi dengan 30%. UU diterapkan di bawah otoritas Kantor HAM dari Kementerian Dalam Negeri. Klaim-klaim harus diajukan dalam kurun waktu 180 hari setelah diterbitkannya undang-undang, dan pihak yang mengklaim harus melepaskan hak atas setiap kompensasi yang lain.¹³

Saat undang-undang memberikan kompensasi kerugian yang diderita oleh orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang, sejumlah hambatan telah mencegah banyak individu untuk memperoleh manfaat di dalam praktiknya. Pertama, para korban harus membuktikan jumlah hari dalam penahanan dengan menunjukkan surat perintah penahanan (dikeluarkan oleh eksekutif) dan perintah pembebasan. Namun, pemerintah militer yang berkuasa di negara memiliki karakteristik menolak mengakui penculikan-penculikan, dan pemerintah yang baru belum berhasil menyingkap banyak fakta penting.¹⁴

Sebagai tambahan, banyak para korban dan keluarga telah bersikap tidak mau menerima kompensasi dari pemerintah karena, menurut mereka, mengajukan kompensasi keuangan adalah suap untuk sesuatu yang tidak dapat mengembalikan atas apa yang telah hilang. Ketidakpuasan publik atas ketentuan-ketentuan amnesti Argentina dapat diseimbangkan dengan menetapkan ganti rugi bagi para korban, tetapi tidak dipandang sebagai suatu penggantian atas penghukuman atau pengurangan kewajiban negara untuk mengidentifikasi dan menghukum para pelanggar HAM.¹⁵

Program-program pemulihan pada awalnya menyertakan pensiun, kesehatan, pelatihan kembali dan yang terkait dengan pendidikan yang bermanfaat, dan sesekali yang bermanfaat untuk perumahan. LSM seperti *Association of the Relatives of Detained-Disappeared people* memainkan peran yang besar dalam prosesnya. Kebijakan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pemerintah telah dikoordinasikan oleh institusi pemerintahan yang baru, *Corporation for Reparations and Reconciliation*, bertugas secara eksklusif sesuai fungsinya. Saat ini mendapat kesan bahwa kebijakan pemulihan diberlakukan agar supaya menghindari persoalan-persoalan kebenaran dan keadilan dan melanjutkan pola yang menegaskan kembali impunitas dan penyangkalan keadilan.¹⁶

Transisi Argentina menuju demokrasi dan responnya atas pelanggaran serius HAM yang dilakukan antara tahun 1975 dan 1983 menyertakan dibentuknya Komisi Nasional Penghilangan Orang [*Comisio'n Nacional sobre Desaparicio'n de Personas* (CONADEP)], penghukuman para pejabat tinggi militer, dan suatu kebijakan luas pemulihan ekonomi. Dua langkah pertama menerima perhatian baik nasional dan internasional dan dibentuk sebagai contoh bagi transisi menuju demokrasi yang kemudian terjadi di banyak negara lainnya. Pemulihan ekonomi bagi korban, namun demikian, tidak menerima perhatian yang sama, sekalipun menjadi cukup terkemuka dalam kancah internasional dalam hal pencapaiannya. Dalam literatur yang jumlahnya signifikan yang eksis pada masa transisi warga Argentina, ada sedikit yang ditemukan mengenai pemulihan ekonomi bagi para korban terorisme negara. Hal ini mungkin karena program-program pemulihan dimplementasikan saat demokrasi telah dibangun kembali selama beberapa tahun di negara ini, sehingga perhatian para analis dan peneliti telah berfokus pada kasus-kasus transisional lain. Alasan lain atas celah ini dalam literatur adalah tanpa suatu keraguan kurangnya publikasi yang tersedia dan informasi akurat yang akan memungkinkan suatu analisis secara mendalam.¹⁷

Sebagai bagian dari latar belakang kebijakan pemulihan Argentina, adalah penting untuk menyoroti rekomendasi yang dibuat oleh CONADEP pada tahun 1984 dalam laporan akhirnya: 'Norma-norma seharusnya diberlakukan agar membantu ekonomi anak-anak dan/atau keluarga dari orang-orang yang dihilangkan selama terjadi penindasan: beasiswa, bantuan sosial, dan kesempatan kerja. Hal yang sama, langkah-langkah dianggap tepat untuk mengurangi masalah-masalah sosial dan keluarga yang timbul dari penghilangan paksa orang-orang yang seharusnya dilakukan.' Ketika rekomendasi ini hanya secara khusus ditujukan untuk satu kejahatan (penghilangan), serangkaian aturan hukum mengenai pemulihan dikeluarkan antara tahun 1984 dan 1985. Keuntungan yang dihasilkan oleh aturan hukum tersebut tidak secara eksklusif bersifat ekonomi, dan aturan tersebut tidak terdiri dari suatu kebijakan pemulihan yang resmi dalam arti sempit; namun demikian, aturan itu sangat penting dalam memulihkan situasi-situasi tertentu dari para ahli waris.¹⁸

¹⁶ Silvia Borzutzky, *op. cit.*, hlm. 180.

¹⁷ María José Guembe, *Economic Reparations for Grave Human Rights Violations: the Argentinean Experience*, dalam Pablo de Greiff, (ed.), *The Handbook of Reparations*, e-book, (New York: Oxford University Press, 2006) hlm. 21-22.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

Dipilihnya Raúl Alfonsín sebagai presiden pada tahun 1983 menandai mulainya suasana kebebasan sipil. Ia mulai menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM serta memberikan kompensasi kepada korban. Kebijakan dan langkah tersebut dikonkretkan diawali dengan pembentukan Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*Conadep*) yang dipimpin seorang novelis, Ernesto Sabato. *Conadep* juga membuka berbagai cabang di beberapa kota besar demi efektivitas kerjanya. Begitu komisi itu berdiri, segera mengalir sejumlah kesaksian baik dari korban itu sendiri maupun dari keluarga korban (yang telah meninggal). Organisasi-organisasi HAM menyerahkan hasil dokumentasi mereka. Staf komisi mengecek tempat-tempat penahanan, kuburan tak dikenal, dan kantor-kantor kepolisian. Banyak pelarian politik di luar negeri kembali dan memberikan kesaksiannya. Kantor-kantor kedutaan dan konsulat Argentina dibuka bagi mereka yang memberikan kesaksian di luar negeri. Potongan-potongan kesaksian rakyat disiarkan televisi nasional selama dua jam. Komisi bekerja sama secara erat dengan keluarga orang hilang guna mencari keberadaan korban. Setiap saat komisi juga melakukan konferensi pers untuk melaporkan proses perkembangan penyelidikan. Bulan September 1984, *Conadep* menuntaskan tugasnya dan menyerahkan laporan kepada presiden. Laporan setebal 50.000 halaman dengan judul *Nunca Mas (Never Again)* berisi bukti-bukti dan dokumentasi berbagai kasus serta lampiran daftar 9.000 nama orang hilang. Laporan itu lalu diterbitkan dalam bentuk buku dan terjual habis.¹⁹

Menurut CONADEP, 1.351 orang dilaporkan bertanggung-jawab atas pelanggaran HAM selama diktator terakhir. Hampir seluruhnya (1.195) diproses di bawah Hukum Militer (*Código de Justicia Militar*) dalam pengadilan-pengadilan sipil. Akan tetapi, hanya tujuh orang dari terdakwa yang dijatuhi hukuman (walaupun mereka yang dihukum tersebut termasuk bekas kepala-kepala negara). Tekanan dari pihak militer mempengaruhi pemerintah untuk mengkompromikan posisi awal mengenai HAM. Pada Desember 1986, Alfonsín, mengumumkan perundang-undangan yang dikenal sebagai "*Final Point*", yang menempatkan suatu batas 60 hari bagi tindakan pidana terhadap mereka yang dilaporkan telah ikut serta dalam pelanggaran HAM selama rezim diktator berkuasa. Hanya 450 kasus terhadap para jenderal, pimpinan, perwira, bawahan, dan polisi yang diizinkan untuk diproses. Bukannya menenangkan militer, "*Final Point*" justru berkontribusi meningkatkan perlawanan dan pemberontakan di pihak militer.²⁰

Menanggapi hal itu, Alfonsín mendorong "*Due Obedience Law*" melalui Kongres, yang mendapat persetujuan pada 5 Juni 1987. "*Due Obedience*" menjadikan seluruh pimpinan dan perwira yang pernah secara aktif ikut serta dalam "perjuangan antissubversif", sampai dengan pangkat letkol, dibebaskan dari pertanggungjawaban dan memaafkan mereka dari segala dakwaan, termasuk penculikan, penyiksaan, dan

¹⁹ Ifdhal Kasim dan Eddie Riyadi Terre, (eds.), *op. cit.*, hlm. 135-136.

²⁰ Michelle D. Bonner, *op. cit.*, hlm. 60.

pembunuhan. Pembebasan itu didasarkan pada penetapan bahwa tindakan-tindakan yang diambil sebagai telah dilakukan dengan mentaati perintah dari atasan.²¹

Dari 1.195 personil militer yang telah diproses atas pelanggaran HAM, 730 orang mendapat manfaat dari "Final Point" dan 379 orang proses hukumnya dihentikan sebagai hasil dari "Due Obedience Law". 43 orang lainnya proses hukumnya dihentikan oleh Mahkamah Agung. Dekrit pengampunan oleh Presiden Menem pada tahun 1989 menyebut 38 orang lainnya, yang telah diproses oleh pengadilan, dibebaskan dari hukuman (sebagai tambahan terhadap 280 perwira yang terlibat dalam persoalan mengenai perang Falkland/Malvinas dan pemberontakan militer pada tahun 1987 dan 1988). Pada Desember 1990, Menem mendekritkan pengampunan berikutnya bagi perwira-perwira tingkat tinggi, membebaskan enam perwira, lima dari mereka telah dijatuhi hukuman yang bersifat tetap.²²

Saat CONADEP dibubarkan, cabang eksekutif menghadapi adanya kebutuhan untuk menciptakan suatu badan yang akan menyusun data yang telah dikumpulkan oleh Komisi dan kemudian memberikannya kepada pengadilan kesimpulan mengenai data yang berasal dari informasi, maupun pengaduan baru mengenai penghilangan orang-orang. Agar sesuai dengan kebutuhan maupun untuk melanjutkan identifikasi dari jenazah-jenazah dan pencarian anak-anak yang dihilangkan, Kantor Menteri Muda untuk Hak Asasi dan Sosial dibentuk di dalam Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 20 September 1984—dua hari setelah penerbitan 'Laporan Tidak Pernah Lagi' (*the 'Never Again Report'/'Informe Nunca Ma's'*).²³

Saat struktur dari Kementerian Dalam Negeri kemudian diubah, kantor ini diberikan status Direktur Nasional untuk HAM. Di antara tugas-tugas yang diberikan kepada Direktur ini yaitu mempromosikan ketaatan dengan norma-norma HAM, yang dilibatkan menerima tuduhan diskriminasi dan pelanggaran HAM, melaksanakan proses ke pengadilan agar supaya memverifikasi dasar tuduhan, dan mengirimkannya kepada otoritas yudisial dan administrasi. Direktur juga bertugas pada pusat dokumen mengenai isu-isu HAM dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan Data Bank Genetik Nasional. Lalu, pada tahun 1996, saat struktur dari Kementerian Dalam Negeri diubah sekali lagi, Direktur Nasional menjadi, sekali lagi, Kantor Kehakiman dan HAM. Pada tahun 1999, Kantor ini diserahkan kepada Kementerian Muda untuk Hak-hak Asasi dan Sosial. Akhirnya, pada Februari 2002, kantor itu diberikan status Sekretariat Hak-hak Asasi dan Sosial. Badan pemerintah ini, yang akan mengacu kepada seluruh dokumen ini menggunakan nama yang sekarang, Sekretariat HAM, yang diberikan kewenangan untuk memberlakukan hukum mengenai pemulihan para korban terorisme dari 1975 hingga 1983.²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 60-61.

²² *Ibid.*, hlm. 61.

²³ María José Guembe, *op. cit.*, hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*

Karakteristik Pelanggaran Berat HAM dan Korban di Cile

Pada tanggal 11 September 1973, Jenderal Augusto Pinochet melakukan suatu kudeta militer, Presiden Salvador Allende dipaksa menjadi bunuh diri, parlemen dibubarkan, dan Konstitusi disingkirkan. Namun, hal itu tidak menjadikan masa lalu berakhir setelah perubahan pada tahun 1990 tetapi muncul kembali pada tahun 1998-99. Pada tanggal 10 Maret 1998 Jenderal Augusto Pinochet pensiun sebagai panglima angkatan bersenjata dan satu hari kemudian menjadi senator seumur hidup. Ketimbang dilupakan, ia menjadi fokus suatu upaya yang dikombinasikan Spanyol atau Inggris untuk membawanya ke pengadilan atas pelanggaran-pelanggaran HAM, lalu menghidupkan kembali pertanyaan yang belum terjawab tentang keterlibatan asing dan internasional di Cile tahun 1972-1989. Kasus itu diperdebatkan atas dicabutnya impunitas terhadap pelanggaran berat HAM dari seorang bekas kepala negara, tapi hal itu juga menimbulkan kepentingan bagi dukungan asing bagi diktator Pinochet.²⁵

Pihak junta menyusun suatu tingkat kekerasan penindasan dari sejak awal. Dalam pernyataannya yang pertama, pihak junta menyatakan bahwa para penentang yang tidak mengakhiri permusuhannya terhadap pemerintah yang baru dan menyerahkan seluruh senjatanya akan ditembak. Pinochet dengan segera memulai suatu rencana keamanan baru yang mendirikan kamp-kamp interniran dan meminta penyerangan ditujukan kepada para pendukung Allende, serikat buruh, golongan kiri, dan para pemrotes yang moderat. Eksekusi secara cepat dilakukan di Stadion Nasional dan Stadion Chile. Pada Oktober 1973 Pinochet menyetujui "*the Caravan Death*", suatu tur helikopter tawanan militer dan interniran kamp. Hal itu dioperasikan sebagai suatu pengadilan dengan kendaraan militer berjalan, menghukum para penentang junta untuk menyisakan pengadilan dengan mengeksekusi dengan segera dalam banyak kasus. Terdapat perkiraan bahwa keterangan yang konservatif menempatkan jumlah pembunuhan pada tahun 1973 berjumlah 160, dengan 10.000 penahanan dan penyiksaan. Banyak pembunuhan dilakukan secara rahasia saat "menghilangkan" orang-orang, didefinisikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai orang-orang yang ditangkap atau terlihat dalam penahanan polisi sebelum seluruh laporan tentang tempat keberadaan mereka diselesaikan.²⁶

Banyak tindakan-tindakan paling represif dilakukan oleh Direktorat Intelijen Nasional (DINA), satu grup perwira-perwira militer yang dipimpin oleh Jenderal Manuel Contreras. Tindakan pertamanya adalah pembunuhan Jenderal Carlos Prats dan isterinya di Argentina. DINA diubah pada tahun 1977 menjadi Pusat Informasi Nasional, suatu struktur yang lebih efektif untuk mengidentifikasi dan menghukum para penentang.

²⁵ Katarina Tomasevski, *Responding to Human Rights Violations 1946-1999*, (The Hague: Kluwer Law International, 2000) hlm. 111.

²⁶ Robert C. Power, *op. cit.*, hlm. 95-96.

Periode ini juga menyaksikan "*Operation Condor*", suatu upaya bersama oleh beberapa rezim represif Amerika Selatan yang menyaksikan para penentang "dihilangkan" ke dalam kamp-kamp tawanan atau kuburan-kuburan rahasia negara-negara tetangga. Salah satu kejahatan operasi militer tersebut adalah pembunuhan Orlando Letelier, duta besar pemerintahan Allende untuk Amerika, di Washington D.C., September 1976. Pembunuhan internasional oleh pihak junta adalah "hilangnya" diplomat Spanyol Carmelo Soria beberapa bulan lebih awal.²⁷

Dinas intelijen 'angkatan bersenjata yang memberontak', khususnya tentara *Dirección de Inteligencia Nacional* (DINA), menahan dan kadang-kadang menyiksa mereka yang dicurigai menentang rezim yang berkuasa. Diperkirakan 3.000 orang, termasuk 132 polisi dan anggota militer, meninggal selama militer berkuasa: sekitar setengah dari jumlah tersebut, 1.205 dibinasakan dalam lima bulan terakhir pada tahun 1973; lainnya 1.216 meninggal antara tahun 1974 dan 1977. Beberapa dari tawanan meninggal disiksa; beberapa dieksekusi. Berbagai individu melarikan diri, walaupun mengasingkan diri baik terpaksa atau bukan, tidak selalu menjamin keselamatan: agen-agen DINA melacak dan membunuh eks komandan tentara, Jenderal Carlos Prats, dan isterinya di Argentina. Pemerintah, terkadang beraksi dengan organisasi-organisasi teroris luar negeri, untuk mengejar yang lainnya—seperti politisi Demokratik Kristen Bernardo Leighton yang ditembak di Roma. Menghancurkan atau mengintimidasi musuh-musuh di pengasingan, otoritas Chile meluncurkan "*Operation Condor*", dalam hal itu Chile bekerja sama dengan rezim-rezim diktator Brazil, Argentina, Uruguay, dan Paraguay untuk menangkap, membunuh, atau dalam beberapa kasus merepatriasi para teroris yang dicurigai.²⁸ Terkait dengan korban, ada pula yang menyebutkan bahwa rezim militer bertanggung-jawab atas tewasnya lebih dari 3.000 orang, 10.000 penyiksaan dan bahkan banyak warga negara Chile yang diasingkan maupun beberapa warga negara asing.²⁹

Pada suatu kesempatan, Valech mengadopsi definisi-definisi berikut: hukuman penjara yang bersifat politis dipahami sebagai penahanan yang sewenang-wenang, dilakukan untuk motif politik, oleh aparat-aparat negara atau orang-orang yang ditugaskan, antara 11 September 1973 (tanggal terjadinya kudeta militer) dan 10 Maret 1990 (tanggal proses peralihan resmi). Penahanan 'sewenang-wenang' dipahami sebagai penahanan yang tidak didasarkan pada norma hukum yang telah ada sebelumnya; penahanan didasarkan pada hukum yang, ketika sah secara teknis, namun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional yang diakui; penahanan yang berkepanjangan melampaui apa yang mungkin dianggap masuk akal; atau penahanan dilakukan oleh, atau diikuti dengan, pelanggaran hak-hak dari tahanan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 96-97.

²⁸ Dinah L. Shelton, (edit.), *op. cit.*, hlm. 167.

²⁹ Marcus Klein, "The Human Rights Violations of the Pinochet Regime and Their Legacy", *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, April 2003; 74, hlm. 109.

Penyiksaan didefinisikan sebagai setiap perbuatan di mana seseorang telah diperlakukan secara sengaja untuk menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang hebat secara fisik atau mental, dengan tujuan untuk mendapatkan dari orang tersebut, atau dari pihak ketiga, informasi atau pengakuan; menghukumnya atas sesuatu yang ia telah lakukan atau dituduh telah melakukan; mengintimidasi atau mengancam bahwa orang atau orang lain, menghancurkan karakter atau merusak integritas fisik atau mental, atau memberikan pernyataan semacam perlakuan tertentu yang mendiskriminasi. Hal ini mensyaratkan bahwa rasa sakit atau penderitaan telah ditimbulkan oleh aparat negara atau orang yang sedang dalam tugas negara, atau bertindak atas dorongan, dengan persetujuan, atau dengan kesabaran dari orang tersebut. Laporan menyatakan bahwa definisi kerja ini telah diambil dari Konvensi-konvensi internasional, dan Inter-Amerika, untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan. Dalam suatu kesempatan, 94% dari mereka yang diakui pada tahun 2005 sebagai penyintas dinyatakan telah mengalami penyiksaan maupun menderita atas pemenjaraan secara politis.³⁰

Selama 17 tahun kekuasaan Pinochet, kekerasan, dan penyiksaan yang kejam diorganisasikan oleh *Dirección de Inteligencia Nacional* (DINA) terhadap mereka yang beroposisi dengan rezim. Sekitar 3.000 orang termasuk 132 polisi meninggal selama otoritarian militer tersebut. Ada 1.216 orang meninggal antara tahun 1974 sampai dengan 1977. Selama 17 kekuasaan Pinochet pula, pengadilan militer menerapkan asas retroaktif terhadap kejahatan politik golongan kiri dan pengadilan sipil membenarkan semua tindakan Pinochet dalam rangka melindungi kepentingan negara.³¹

Berdasarkan pada uraian di atas, maka apa yang sesungguhnya terjadi di Chile, apabila dikaitkan dengan Statuta Roma 1998, maka kejahatan yang terjadi dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*),³² yaitu meliputi: pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan persekusi.

Praktik Pemulihan yang Telah Dilakukan di Chile

Setelah kediktatoran militer di Chile yang berlangsung dari 11 September 1973 sampai 11 Maret 1990, pemerintah demokratis yang baru membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Dekrit Tertinggi tanggal 25 April 1990.³³ Komisi nasional dibentuk untuk memberi penjelasan tentang kematian dan penghilangan orang di Chile dengan menimbang tiga aspek pemulihan: pengungkapan kebenaran dan "mengakhiri kerahasiaan", pengakuan martabat para korban dan rasa

³⁰ Cath Collins, *op. cit.*, hlm. 69.

³¹ Eddy O. S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010) hlm. 237.

³² *Supra* catatan kaki no. 12.

³³ Ifdal Kasim dan Eddie Sius R. Laggut, *op. cit.*, hlm. 84, mengutip Cecilia Medina Quiroga, *Report of the Maastricht Seminar*, hlm. 101-116.

sakit yang diderita oleh keluarga mereka, dan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.³⁴

Komisi didirikan berdasarkan *Supreme Decree* No. 355, tanggal 25 April 1990 yang diterbitkan oleh Presiden Aylwin dengan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Komisi bertugas selama sembilan bulan (Mei 1990-Februari 1991). Komisi ini dikenal pula dengan nama "*Rettig Commission*", yaitu nama ketua komisi, Raúl Rettig, mantan senator dan di dalamnya terdiri dari delapan orang komisioner, enam pria dan dua wanita.³⁵

Komisi ini diberi mandat untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM yang menimbulkan kematian atau penghilangan selama tahun-tahun berkuasanya militer, dari 11 September 1973 sampai 11 Maret 1990. Secara signifikan, penyiksaan dan kejahatan-kejahatan lain yang tidak menimbulkan kematian berada di luar ruang lingkup mandat yang dimiliki oleh komisi. Komisi Rettig merilis laporannya pada bulan Februari 1991 yang populer dengan nama "*Rettig Report*". Laporan itu didukung penuh oleh Presiden Aylwin. Ketika menyampaikan laporan itu kepada rakyat, ia meminta maaf kepada para korban dan keluarga mereka atas nama negara. Augusto Pinochet dan para pimpinan angkatan bersenjata menolak temuan-temuan dari laporan itu.³⁶

Laporan akhir Komisi mendokumentasikan 3.428 kasus penghilangan, pembunuhan, penyiksaan dan penculikan, termasuk laporan-laporan singkat dari hampir seluruh korban yang kisahnya didengar. Sebagian besar kasus penghilangan orang secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah berlangsung antara tahun 1974 dan Agustus 1977 sebagai suatu strategi yang direncanakan dan dikoordinasikan oleh pemerintah. DINA dinyatakan bertanggung-jawab atas sejumlah tindakan represif yang bersifat politis secara signifikan selama periode ini.³⁷

Beberapa rekomendasi yang dibuat oleh komisi yaitu: pembentukan *National Corporation for Reparations and Reconciliation* untuk menyediakan bantuan yang berkelanjutan terhadap para korban yang bersaksi. Komisi menyarankan agar pemulihan seharusnya termasuk langkah-langkah simbolis maupun bantuan hukum, keuangan, medis dan administratif secara signifikan; penggunaan legislasi HAM, pembentukan kantor ombudsman dan memper-kuat otoritas sipil dalam masyarakat dan sistem peradilan di Cile. *National Corporation for Reparations and Reconciliation* di atas didirikan oleh Presiden Cile Aylwin (diberlakukan dengan UU No. 19.123, 31 Januari 1992), sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi Rettig. Dukungan keuangan terus-menerus telah diperuntukkan bagi keluarga-keluarga para korban dalam laporan komisi, dengan

³⁴ Jayni Edelstein, "Rights, Reparations and Reconciliation: Some Comparative Notes", <<https://www.csvr.org.za/publications/1707-rights-reparations-and-reconciliation-some-comparative-notes>> [01/01/2017].

³⁵ "Truth Commission: Chile 90" <https://www.usip.org/publications/1990/05/truth-com_mission-chile-90> [30/01/2017].

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

total sekitar 16 juta Dollar Amerika tiap tahun. Lembaga ini juga melanjutkan penyelidikan yang belum dapat dilengkapi oleh komisi.³⁸

Lembaga ini bersifat sementara, adalah organ negara yang didesentralisasi di bawah Kementerian Dalam Negeri bermandat selama dua tahun untuk memberikan kompensasi kepada keluarga-keluarga korban dan mengembangkan program-program untuk membantu perkembangan "budaya penghormatan atas HAM" di Chile. Korporasi ini memiliki dua tujuan. Pertama untuk memeriksa lebih dari 600 kasus yang belum diselesaikan oleh Komisi. Tujuan kedua, ditujukan terkait dengan tujuan pertama, yaitu untuk mengelola pemulihan bagi para korban sebagaimana telah diidentifikasi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan oleh Korporasi sendiri.³⁹

Pemulihan termasuk uang pensiun bulanan, pembayaran dalam jumlah-tetap, manfaat di bidang kesehatan, dan manfaat di bidang pendidikan. Secara rinci, undang-undang menetapkan uang pensiun bulanan sebesar 140.000 Peso Chile untuk para keluarga korban. Uang pensiun dibagikan dengan memberikan 40% bagi pasangan yang masih hidup, 30% bagi yang ibunya meninggal (atau ayahnya dalam hal tidak ada ibunya), 15% bagi ibu atau ayah dari anak-anak kandung korban, 15% bagi tiap-tiap anak korban di bawah usia 25 tahun dan bagi anak-anak difabel di semua usia. Tiap-tiap ahli waris juga berhak untuk mengambil satu kali tunjangan hidup yang setara dengan uang pensiun selama 12 bulan, yang tidak dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenai pajak. Undang-undang juga memberikan hak atas pelayanan perawatan kesehatan gratis dalam sistem perawatan kesehatan nasional bagi keluarga-keluarga korban yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan. Sebagai tambahan, Kementerian Kesehatan membentuk "Program Pemulihan dan Perawatan Kesehatan Secara Menyeluruh" untuk melayani para individu yang terdampak oleh pelanggaran-pelanggaran HAM. Program itu termasuk perawatan medis yang bersifat umum, jaminan sosial, konseling psikologis, dan pelayanan lainnya yang bebas biaya. Para orang tua korban, anak-anak atau adik/kakak kandung dapat dipilih untuk menerima bantuan dari program ini.⁴⁰

Anak-anak korban berhak atas manfaat yang terkait dengan pendidikan khusus hingga usia 35 tahun. Undang-undang menetapkan bahwa anak-anak yang sedang duduk di sekolah-sekolah menengah, universitas-universitas, lembaga-lembaga profesional atau lembaga-lembaga teknis akan menerima beasiswa untuk membayar biaya pendaftaran dan biaya kuliah, ditambah uang bulanan untuk memenuhi biaya hidup. Undang-undang juga membebaskan anak-anak para korban dari kewajiban mengikuti wajib militer.⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Jayni Edelstein, "Rights, Reparations and Reconciliation: Some Comparative Notes", <<https://www.csvr.org.za/publications/1707-rights-reparations-and-reconciliation-some-comparative-notes>> [01/01/2017].

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Klaim-klaim atas pemulihan dipertautkan menjadi pekerjaan Komisi dan Korporasi sendiri. Jika nama seorang korban termasuk di dalam laporan, hal itu menjadi bukti yang cukup untuk mendapatkan manfaat berdasarkan undang-undang. Suatu "Higher Council" juga didirikan untuk mengelola Korporasi dan membuat aturan-aturan internalnya dan peraturan yang bersifat perosedural. Sebagai tambahan atas kompensasi keuangan yang diatur undang-undang, langkah-langkah simbolis juga ditempuh oleh presiden dan lembaga legislatif. Khususnya, mantan Presiden Patricio Aylwin yang mengajukan permohonan maaf secara formal kepada para korban dan keluarga mereka atas nama negara, dan meminta tentara untuk mengakui perannya dalam kekerasan.⁴² Korporasi Cile sering dianggap sebagai tonggak bersejarah dalam perlindungan HAM. Namun demikian, undang-undang juga telah dikritik atas dasar bahwa undang-undang itu tidak menetapkan kompensasi yang adil, dibandingkan dengan pemulihan secara perdata yang telah tersedia berdasarkan hukum Cile yang undang-undangnya tidak dihalangi oleh suatu dekret amnesti tahun 1978.⁴³

Sumber kedua yang mengkhawatirkan adalah bahwa banyak dari para korban dikeluarkan dari perlindungan berdasarkan hukum. Sejak mandat komisi kebenaran Cile untuk menyelidiki, *inter alia*, kasus-kasus penghilangan para tahanan, eksekusi dan penyiksaan yang mengakibatkan kematian, langkah-langkah yang bersifat pemulihan tidak berlaku bagi para korban secara individual yang selamat dari siksaan, karena kasus-kasus mereka dikeluarkan dari laporan Komisi. Selanjutnya, dekret amnesti Cile menjadikan pemulihan menjadi sulit –jika tidak menjadi tidak mungkin– bagi para korban yang selamat dari penyiksaan untuk melakukan gugatan perdata terhadap negara. Meskipun terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, tetapi, hukum Cile telah secara umum dipandang sebagai suatu upaya yang berhasil yang memiliki signifikansi secara historis dan legal yang besar.⁴⁴

Program-program pemulihan dibatasi fakta bahwa Komisi Rettig tidak dapat menyebut para korban pelanggaran berat HAM di luar mandatnya, termasuk para korban penyiksaan yang tidak mengakibatkan kematian atau penghilangan. Hampir dua dekade setelah dirilisnya laporan Komisi Rettig. Kongres Cile mengeluarkan UU No. 20.405 pada bulan November 2009, menciptakan *Institute for Human Rights* dan membuka kembali kualifikasi dari para korban yang berhak atas pemulihan.⁴⁵

Kewenangan Komisi Nasional itu berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran serius HAM yang dilakukan di Cile selama kurun waktu kediktatoran militer. Pelanggaran berat HAM dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehidupan; penghilangan paksa, hukuman mati secara sumir dan di luar pengadilan, penyiksaan yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ "Truth Commission: Chile 90" <https://www.usip.org/publications/1990/05/truth-com_mission-chile-90> [30/01/2017].

diikuti dengan kematian, maupun penculikan tak terpecahkan dan kematian orang-orang yang dilakukan oleh aktor bukan negara dengan dalih politik. Sebagaimana telah diamati dengan cermat, pembentukan Komisi Nasional dan kegiatan yang mengikutinya dengan sendirinya merupakan suatu tindakan pemulihan pertama, dengan memberikan kepuasan parsial kepada keluarga para korban berkenaan dengan keinginan mereka untuk mengetahui keadaan di mana keluarga mereka dibunuh atau dihilangkan.⁴⁶ Komisi Nasional menggambarkan tiga kategori pemulihan, *pertama*, pemulihan simbolik untuk membersihkan nama korban; *kedua*, tindakan hukum dan administratif untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengakuan atas kematian (status keluarga, warisan, perwalian hukum untuk orang-orang di bawah umur); ketiga, kompensasi termasuk tunjangan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan.⁴⁷

Komisi kebenaran Cile yang pertama, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CNVR atau 'Rettig Commission', 1990-91) mengakui kematian dan penghilangan selama diktator militer tahun 1973-1990, tetapi tidak mengindividualisasi kasus-kasus yang selamat dari penyiksaan. Suatu badan yang melanjutkannya mempersiapkan untuk melengkapi klasifikasi kasus yang dilaporkan pada tahun 1996, dan suatu jumlah total yang diakumulasikan dari 3.195 korban dengan demikian telah diakui. (Hasil-hasil ini akan menunjuk di bawah judul yang bersifat umum 'Rettig'). Kebenaran dihubungkan dengan kedua hal pemulihan dan keadilan dalam fase ini. Pemulihan, termasuk suatu pensiun bulanan yang sederhana, diperluas kepada keluarga dekat dari seluruh nama-nama dalam daftar-daftar nama yang telah diakumulasikan. Latar bela-kang informasi pada kasus-kasus yang diajukan kepada Rettig, apakah pada akhirnya diakui atau tidak, dikirimkan ke pengadilan. Hal ini segera membawa sedikit perubahan keadilan, sejak praktik yudisial dalam tahun 1991 dan 1996 dengan tegas mendukung impunitas. Namun demikian hal itu menggambarkan perbedaan yang signifikan antara komisi ini dan komisi yang berikutnya: Rettig, tidak seperti Valech, meninggalkan secara terbuka pintu yang menghubungkan antara pengungkapan-kebenaran dan keadilan.⁴⁸

Komisi kebenaran Cile kedua, secara resmi dinamakan "*National Commission on Political Imprisonment and Torture*", diumumkan pada pertengahan tahun 2003, sebagai bagian dari 'paket kebijakan HAM' yang dinamakan '*No hay mañana sin ayer*' [Tiada hari esok tanpa hari kemarin]. Pemilihan waktunya mengingatkan pada sesuatu: putusan dibuat akibat dari gelombang besar tuntutan keadilan (lihat di bawah). Komisi, diketuai oleh pendeta senior Sergio Valech, menjadi pusat perhatian dari kebijakan baru yang diumumkan. Bekerja dari atau atas nama orang-orang yang selamat secara politik – penahanan atau penyiksaan dengan motif dilakukan oleh aparat negara antara tahun

⁴⁶ Ifdal Kasim dan Eddie Sius R. Laggut, *op. cit.*, hlm. 107.

⁴⁷ *Idem.*, hlm. 84-85.

⁴⁸ Cath Collins, "Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The Case of the 'Valech Commission' in Chile", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 49, Iss. 1, (Feb 2017): 55, hlm. 64.

1973 dan 1990. Orang-orang pada akhirnya memberanikan diri dalam jumlah besar secara tidak diduga: tenggat waktu yang semula harus diperpanjang, dan pernyataan tambahan yang diambil, sebagai hal yang perlu dipikirkan mengenai jangkauan dan kedalaman dari kekejaman yang hingga saat ini sebagian besar diabaikan menjadi fokus perhatian. Laporan final dari Valech yang diterbitkan berfungsi sebagai suatu katalog yang menggambarkan kesan suram dari kedalamam di mana rezim saat itu telah tenggelam dalam upaya-upaya untuk mendehumanisasi dan menghancurkan pihak yang dirasa sebagai musuhnya. Klasifikasi tambahan dalam lampiran memberkan jumlah total pada tahun 2005 hampir 29.500 para penyintas yang diakui.⁴⁹ Komisi kedua ini dilantik oleh presiden Cile Ricardo Lagos pada tanggal 12 Agustus 2003 dan menerbitkan laporannya pada bulan November 2004.⁵⁰

Komisi telah menyatakan suatu tuduhan yang sangat tepat penggunaan penyiksaan sistematis oleh diktator militer, seperti dilansir oleh *Human Rights Watch* hari ini. Dalam laporan yang dirilis kemarin malam, komisi mengumpulkan pengakuan dari ribuan para korban penyiksaan yang sebelumnya belum pernah dilaporkan atas kekerasan yang mereka derita.⁵¹

National Commission on Political Imprisonment and Torture (Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, "Valech Commission"), bertugas dari September 2003-Juni 1, 2005 (1,9 tahun).⁵² Komisi Rettig hanya diizinkan untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kematian/penghilangan, dan para korban dan masyarakat sipil mendorong upaya-upaya tambahan untuk mengaitkannya dengan pelanggaran-pelanggaran pada era Pinochet yang tidak menimbulkan kematian seperti penyiksaan dan penahanan yang tidak sah. Presiden Ricardo Lagos membuat Komisi Valech sebagai suatu badan penasihat untuk dokumen selanjutnya mengenai kekerasan-kekerasan di bawah diktator militer.⁵³

Komisi Valech dibentuk tanggal 26 September 2003, diterbitkan oleh Presiden Republik Cile dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah menyelesaikan penyelidikan awalnya, komisi ini diatur oleh "*Supreme Decree*" No. 1086, 3 November 2004 untuk menyempumakan laporannya dengan informasi tambahan atas kasus-kasus yang belum terselesaikan. Komisi memiliki mandat untuk dokumentasikan pelecehan terhadap hak-hak sipil atau penyiksaan bermotif politik dan untuk mendokumentasikan pelecehan terhadap hak-hak sipil atau penyiksaan bermotif politik yang terjadi antara

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ "Commission of Inquiry: Chile 03", <https://www.usip.org/publications/2003/09/com_mission-inquiry-chile-03> [30/01/2017].

⁵¹ "Chile: Government Discloses Torture was State Policy, Commission Calls for Reparations for Thousands Tortured during Pinochet Era", <<https://www.hrw.org/news/2004/11/29/chile-government-discloses-torture-was-state-policy>> [31/01/2017].

⁵² "Commission of Inquiry: Chile 03", <https://www.usip.org/publications/2003/09/com_mission-inquiry-chile-03> [30/01/2017].

⁵³ *Ibid.*

tanggal 11 September 1973 dan 10 Maret 1990 oleh aparaturnegara dan orang-orang yang sedang dalam dinas. Komisi juga diinstruksikan untuk mengidentifikasi para korban, mengajukan tindakan pemulihan dan membuat suatu laporan akhir.⁵⁴

Komisi Valech terdiri dari delapan orang: enam pria dan dua wanita. Presiden Lagos menyebutkan nama-nama ke delapan orang tersebut di dalam dekrit pendirian komisi. Uskup Sergio Valech mengetuai komisi ini. Komisi Valech menyampaikan laporan pertamanya sebanyak 1.200 halaman kepada Presiden Ricardo Lagos pada tanggal 10 November 2004, yang kemudian disampaikan kepada publik dalam suatu pidato yang kemudian ditayangkan di televisi pada bulan itu. Presiden meminta Komisi untuk membuat suatu laporan yang bersifat melengkapi dengan mempertimbangkan sekitar 1.000 kasus tambahan yang disampaikan oleh para korban dan keluarga mereka, tetapi komisi tidak dapat menyelesaikannya dalam batas waktu yang telah ditentukan sejak awal masa tugasnya. Laporan komisi yang bersifat melengkapi ini disampaikan pada bulan Juni 2005. Laporan pertama tersedia di laman Komisi Penasihat yang dibentuk pada tahun 2009.⁵⁵

Beberapa temuan yang tertuang dalam kesimpulan yang dibuat oleh komisi, yaitu: penyiksaan dan penahanan digunakan sebagai alat untuk mengontrol politik oleh otoritas-otoritas Negara dan diabadikan dengan dekrit dan hukum yang melindungi perilaku yang represif, secara implisit didukung oleh lembaga peradilan. Penyiksaan yang dilakukan oleh para anggota Angkatan Bersenjata dan *Carabineros* (polisi paramiliter) merupakan suatu praktik yang lazim pada skala nasional; laporan awal yang dimiliki oleh komisi merupakan pengakuan dari 35.868 orang, dari jumlah itu 27.255 orang dianggap sah. Laporan yang melengkapi ini memasukan 1.204 kasus-kasus tambahan. Sekitar dua pertiga pelecehan didokumentasikan dalam kasus-kasus yang berlangsung selama tahun 1973.⁵⁶

Komisi merekomendasikan pemulihan bagi para korban penahanan dan penyiksaan yang teridentifikasi selama rezim militer. Pemulihan yang bersifat material diberikan secara individual, pensiun, pendidikan dan manfaat kesehatan, maupun tindakan-tindakan simbolik kolektif yang direkomendasikan. Pada tanggal 12 Agustus 2003 Presiden Ricardo Lagos mengakui penggunaan penyiksaan dan pelecehan-pelecehan lainnya dan secara formal meminta maaf kepada para korban dan keluarganya atas nama Negara.⁵⁷

Pada tahun 2005 pemerintah Chile memutuskan untuk memberikan 28.459 para korban yang terdaftar dan keluarga mereka kompensasi dari pemerintah yang bersifat abadi (sekitar 200 Dollar Amerika per bulan) dan pendidikan gratis, perumahan, dan pelayanan kesehatan. UU No. 19.992, diubah pada bulan Desember 2009, mengatur

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

secara detail modalitas dan kualifikasi dari mereka yang berhak atas pemberian pemulihan. Pada tanggal 24 November 2009, Kongres Cile mengesahkan UU No. 20.405 yang membentuk *Institute for Human Rights*. Berdasarkan undang-undang ini, mantan presiden Michell Bachelet ditugasi dengan mendirikan suatu komisi penasehat untuk melakukan kualifikasi para tahanan yang dihilangkan, orang-orang yang dibunuh dengan eksekusi di luar proses hukum, maupun, tawanan karena keyakinannya dan para korban penyiksaan. Badan ini mempunyai waktu enam bulan untuk melakukan kualifikasi sekitar 4.000 kasus baru untuk pemulihan, berdasarkan hasil kerja Komisi Valech dan Komisi Rettig, maupun pada kasus-kasus baru hasil dari penyelidikan dari proses yudisial. Kepala Gereja Katholik Valech akan mengetuai tindak lanjut mekanisme ini yang terdiri dari anggota-anggota yang sama seperti Komisi 'Valech'. Pada bulan Januari 2010, "Museum of Memory and Human Rights" dibuka di Santiago, Cile.⁵⁸

Pengaruh kuat terhadap publik dari laporan Valech pada awal penerbitannya tahun 2004 bersifat substansial, bahkan mungkin lebih besar daripada laporan Rettig pada masanya. Di jarak yang lebih jauh dari peristiwanya, dan menentang latar belakang politik secara bertahap dan ketidakpercayaan lembaga yudisial dari Pinochet dan beberapa pengikutnya yang terkenal karena nama buruknya, rincian kejahatan-kejahatan yang muncul termasuk menggunakan anjing pada para tawanan wanita yang telanjang, menyiksa anak-anak untuk membuat orang tua mereka bicara, atau 'efek samping' (*'collateral damage'*) dari kegagalan membujuk melalui pemukulan yang berkepanjangan dan serangan secara seksual membuat menjadi lemah, menutup mata dengan kain terhadap para tawanan. Laporan-laporan tersebut hampir tidak rentan terhadap pembenaran 'keadaan darurat perang' bahwa beberapa telah ditemukan setidaknya masuk akal terkait kematian-kematian dari para lelaki militan muda dengan segera sebagai konsekuensi buruk dari kudeta.⁵⁹

UU No. 19.123. menyediakan "pensiunan", yang merupakan tunjangan bulanan kepada keluarga para korban pelanggaran HAM atau kekerasan politik yang diidentifikasi dalam laporan Komisi Nasional dan orang-orang yang diakui sebagai korban oleh Korporasi sendiri (Pasal 17 dan 18). Yang berhak untuk mengajukan permohonan "pensiun" seperti itu adalah pasangan dari korban yang masih hidup, ibu (ayau ayah kalau ibu tidak ada) dari anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun atau anak-anak cacat dari segala umur (Pasal 20). Bentuk-bentuk lain kompensasi adalah tunjangan medis (Pasal 28) dan tunjangan pendidikan (Pasal 29-31).⁶⁰

Dapat dicatat bahwa Cile telah memberi banyak penekanan pada peng-ungkapan kebenaran berkenaan pelanggaran yang paling serius terhadap HAM: hak untuk hidup. Pemulihan difokuskan terutama pada pembersihan nama baik para korban pelanggaran

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ifdal Kasim dan Eddie Sius R. Laggut, *op. cit.*, hlm. 86.

serius tersebut dan pada kompensasi kepada keluarga mereka. Sementara itu harus dicatat bahwa tindakan pemulihan di Cile tidak mencakup pelanggaran serius HAM lainnya dan bahwa tetap tidak jelas apakah dan sejauh mana orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan selama ketidakadilan militer itu akan dibawa ke depan pengadilan.⁶¹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelanggaran berat HAM baik di Argentina dan Cile yang ditandai dengan adanya keterlibatan aparat militer sebagai pelaku utamanya, dengan mengacu kepada Pasal 7 Statuta Roma 1998, maka dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Terkait hal itu, para korban mengalami: pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, serta penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan persekusi. Adapun di Cile para korban mengalami: pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan persekusi.

Kemudian, praktik pemulihan oleh kedua negara tersebut dilakukan melalui pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial para korban yang secara konkret diwujudkan, antara lain, dalam bentuk berupa pemberian uang pensiun, kompensasi, layanan kesehatan, maupun beasiswa pendidikan.

Daftar Pustaka

- De Greiff, Pablo (ed.), 2006, *The Handbook of Reparations*, e-book, Oxford University Press, New York.
- Hiariej, Eddy O. S., 2010, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kasim, Ifdhal dan Sius R. L, Eddie, (eds.), 2002, *Mereka yang Menjadi Korban Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, cetakan ke-1, ELSAM, Jakarta.
- Kasim, Ifdhal dan Riyadi Terre, Eddie, (eds.), 2003, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, cetakan ke-1, ELSAM, Jakarta.
- Tomasevski, Katarina, 2000, *Responding to Human Rights Violations 1946-1999*, Kluwer Law International, The Hague.
- Bonner, Michelle D., "Defining Rights in Democratization: The Argentine Government and Human Rights Organizations, 1983-2003", *Latin American Politics and Society*, 47, 4, Winter 2005.

⁶¹ *Ibid.*

- Borzutzky, Silvia, "The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile", *Latin American Research Review*, 42, 1, 2007.
- Collins, Cath, "Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The Case of the 'Valech Commission' in Chile", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 49, Iss. 1, Feb 2017.
- Klein, Marcus, "The Human Rights Violations of the Pinochet Regime and Their Legacy", *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 74, April 2003.
- Power, Robert C., "Pinochet and the Uncertain Globalization of Criminal Law", *The George Washington International Law Review*, 39, 1, 2007.
- "Commission of Inquiry: Chile 03", <<https://www.usip.org/publications/2003/09/commission-inquiry-chile-03>> [30/01/2017].
- "Chile: Government Discloses Torture was State Policy, Commission Calls for Reparations for Thousands Tortured during Pinochet Era", <<https://www.hrw.org/news/2004/11/29/chile-government-discloses-torture-was-state-policy>> [31/01/2017].
- "Truth Commission: Chile 90" <<https://www.usip.org/publications/1990/05/truth-commission-chile-90>> [30/01/2017].
- Jayni Edelstein, "Rights, Reparations and Reconciliation: Some Comparative Notes", <<https://www.csvr.org.za/publications/1707-rights-reparations-and-reconciliation-some-comparative-notes>> [01/01/2017].
- Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Kejahatan Internasional.
- Shelton, Dinah L., (edit.), 2005, *Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity*, [A-H] 1, Thomson Gale, Farmington Hills, MI.
- Kerry Whigham, 2016, "Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies", Disertasi, New York University,

